

Implementasi Sistem Resi Gudang (Srg) Komoditas Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Imran¹, Wedy Nasrul², Yusnaweti Amir³
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
imranjmk2019@gmail.com

Abstrak

Gambir merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan. Persoalan utama yang dihadapi petani gambir adalah ketergantungan dengan Tengkulak atau lebih familiar disebut dengan toke. Adanya dominasi pedagang Kabupaten yang merupakan kaki tangan dari para eksportir gambir, penentuan harga di pasar gambir lebih didominasi oleh kaki-tangan pedagang besar (eksportir), dan petani dinilai tidak mampu memenuhi kualitas yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari sistem resi gudang komoditas Gambir dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi tersebut di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan tehnik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari sistem resi gudang pada komoditas Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasi sistem resi gudang tersebut yakni dari aspek komunikasi, yang mana masih banyak petani yang tidak mendapatkan informasi secara jelas terkait sistem resi gudang. Dari aspek birokrasi dan disposisi, belum terjalin sinergitas antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program tersebut. Dari aspek sumber daya, dapat dilihat bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pengelola gudang sistem resi gudang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Kemudian dari aspek struktur birokrasi, sudah ada standar operasional prosedur pengelolaan gudang sistem resi gudang tetapi belum bisa diterapkan secara maksimal.

Kata Kunci: implementasi, sistem resi gudang, gambir

Abstract

Gambir is one of the leading products in Lima Puluh Kota Regency, but in its development, there are several problems. The main problem faced by gambir farmers is dependence on Middlemen or more familiarly called Toke, . the dominance of Regency traders who are the henchmen of gambir exporters, price determination in the gambir market is more dominated by the henchmen of large traders (exporters), and farmers are considered unable to meet the desired quality. This study aims to determine the implementation of the warehouse receipt system for Gambir commodities and the factors that influence the implementation in Lima Puluh Kota Regency. The research

uses qualitative descriptive methods. Data collection techniques use in-depth interviews, observation and documentation techniques. Data analysis was carried out in four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the implementation of the warehouse receipt system for Gambir commodities in Lima Puluh Kota Regency has not been running optimally. Several factors that influence the suboptimal implementation of the warehouse receipt system are from the communication aspect, where many farmers still do not get clear information regarding the warehouse receipt system. From the bureaucratic and disposition aspects, there has been no synergy between stakeholders in running the program. From the resource aspect, it can be seen that the competence of the warehouse manager of the warehouse receipt system is still lacking and needs to be improved. Then, from the aspect of bureaucratic structure, there are already standard operating procedures for warehouse management of the warehouse receipt system but they have not been implemented optimally.

Keywords: implementation, warehouse receipt system, gambir

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup berkembang. Hal ini ditandai dengan jumlah produksi gambir yang meningkat setiap tahunnya dan pasar gambir sudah berkembang dan tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tempat penampungan (gudang) gambir rata-rata dimiliki oleh pedagang besar yang berpusat di kota Padang. Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani dalam memasarkan produknya adalah dominasi pedagang Kabupaten yang merupakan kaki tangan dari para eksportir gambir. Melalui kaki-tangannya di daerah, membuat pedagang pengumpul dan petani lainnya tidak berperan (Buharman, Bharnel dan M. Ali, 2001). Penentuan harga di pasar gambir lebih didominasi oleh kaki-tangan pedagang besar (eksportir), walaupun pembelinya banyak, tetapi tetap saja tidak berlaku hukum penawaran dan permintaan. Praktek yang terjadi adalah pengaturan pembelian secara bergilir atau sebangsa arisan di antara pedagang desa oleh kaki tangan pedagang besar dengan harga yang telah ditentukannya. Harga gambir juga berfluktuasi, harga terendah pernah mencapai Rp. 15.000,- harga tertinggi Rp. 120.000,-/Kg (W. Nasrul dkk, 2023).

Menurut Buharman *et.al* (2001), pedagang pengumpul atau tengkulak lebih diminati petani gambir dalam memenuhi kebutuhan keuangannya karena urusan tidak berbelit-belit, jika butuh langsung uang yang dipinjam diberikan oleh pengumpul ke petani. Sehingga ketergantungan kepada Tengkulak dikampung-kampung penghasil gambir sangat tinggi, karena lebih mudah dan sulitnya petani mengakses lembaga keuangan formal. Selain lebih mudah meminjam ke pengumpul, angsuran dilakukan setelah 6 bulan (saat panen/produksi), sementara lembaga keuangan formal tidak bisa melakukan sistem ini. Namun petani peminjam wajib menjual gambir mereka ke pengumpul yang memberikan pinjaman. Pengumpul akan memotong harga dan

pinjaman sekitar Rp. 2.000 sd 3.000,-/kg. Potongan ini sangat besar jika rata-rata produksi petani mencapai 3 sd 4 ton gambir sampai selesai produksi.

Permasalahan pasar dan pemasaran gambir di atas sangat merugikan petani di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah daerah berupaya melakukan solusi dan perbaikan, dimana pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kementerian Perdagangan telah membuat dua gudang yang akan digunakan sebagai Sistem Resi Gudang (Dekadepos, 2023). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat suatu program yang bertujuan membantu petani dalam mengatasi permasalahan mengenai pembiayaan usaha tani dan antisipasi terhadap harga rendah yang diterima petani pada musim panen. Program tersebut adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem Resi Gudang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang diatur dalam Undang - undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah menjadi Undang - undang Nomor 9 Tahun 2011. Namun, SRG yang didirikan pemerintah tidak berjalan dengan optimal dan tidak diminati oleh petani gambir.

Berdasarkan kondisi di atas, maka penting dilihat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk untuk: 1) mendeskripsikan seperti apa implementasi Sistem Resi Gudang komoditas Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 2) menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak maksimal beroperasinya sistem resi gudang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Isaac dan Michael dalam buku Jallaluddin Rakhmat (1989) metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta/karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Fokus penelitian membahas bagaimana implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang pada komoditi Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka terdapat empat aspek yang menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana implementasi kebijakan sistem resi gudang pada komoditi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu: komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Jumlah informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yaitu Pengelola Gudang dan Petani gambir Kecamatan Pangkalan. Informan tambahan berjumlah 8 orang yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, perwakilan dari BAPPEBTI, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Lima Puluh Kota, Petani Gambir di Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan kapur IX, Pemerhati gambir dan Pengurus Asosiasi Pekebun, Pelaku dan Pemerhati gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Thalib (2022) menyatakan bahwa pada pengumpulan data perlu diperhatikan validasi data yaitu data yang telah terkumpul menggambarkan realita yang

ingin diungkapkan oleh peneliti pola kualitatif. Validitas ditentukan ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu; pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Resi Gudang Komuditas Gambir Di Kabupaten Lima Puluh kota

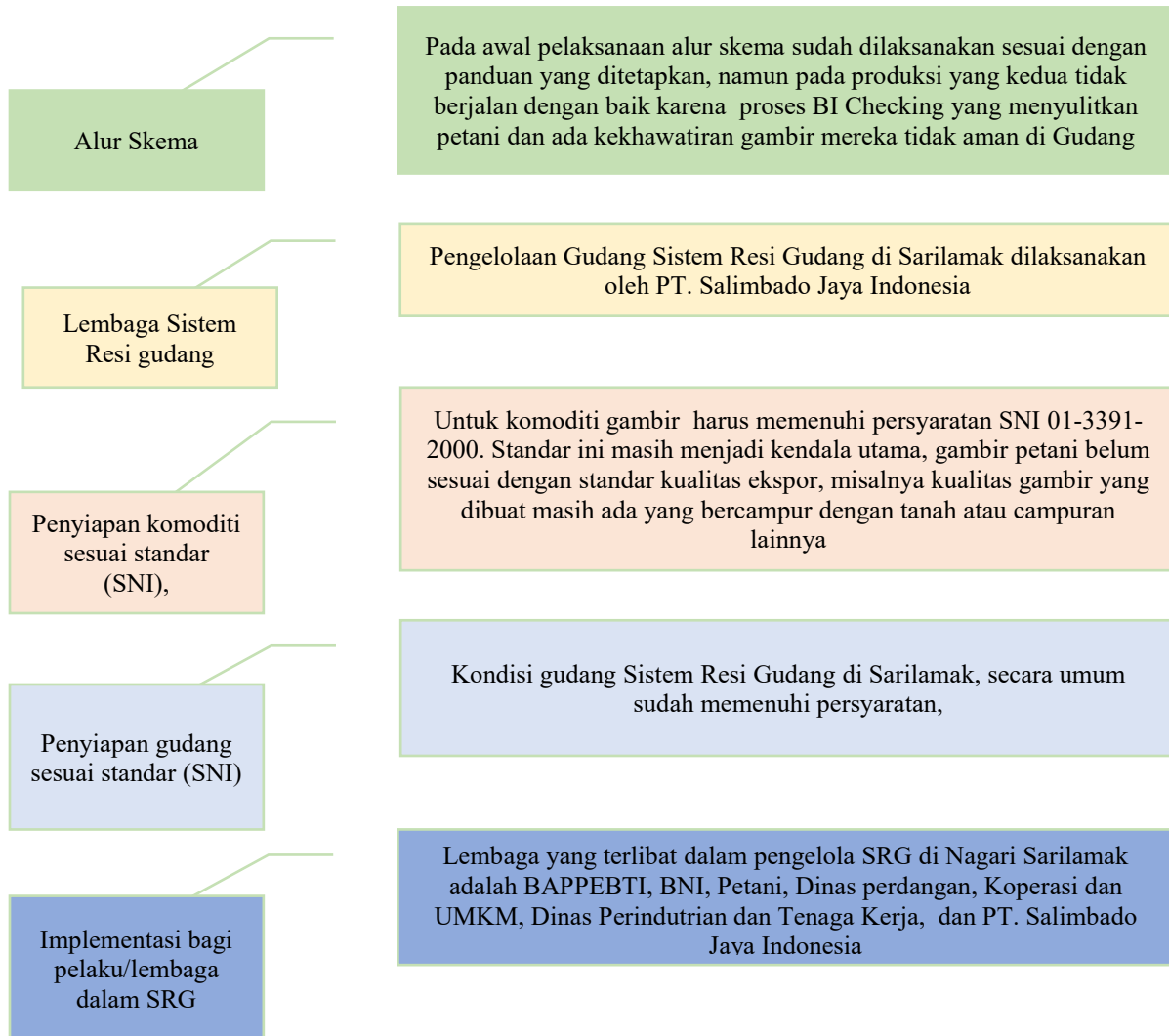
Implementasi Sistem Resi Gudang, dilihat dalam dua hal yaitu landasan hukum dan kondisi Gudang Sistem Resi Gudang itu sendiri. Landasan hukum sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan mulai dari pusat hingga di daerah dalam mengatur mekanisme Pengelolaan Sistem. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. di dalam kebijakan tersebut, disebutkan bahwa Sistem Resi Gudang yang selanjutnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Terkait komoditas perkebunan gambir, telah diatur hal-hal berikut :

- a. Pengolahan gambir dilakukan dengan teknik yang benar, terampil dan peralatan yang terstandarisasi.
- b. Gambir yang dihasilkan gambir murni dengan mutu yang baik dan tidak di campur dengan bahan lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Penentuan harga getah gambir kering murni (GGKM) setiap bulannya harus melalui rapat timpenetapan harga GGKM, tim GGKM terdiri dari unsur pemerintah, kelompok mitra, asosiasi petani gambir, eksportir, dan akademisi
- d. Penetapan harga gambir dapat mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) petani gambir untuk menjaga kelangsungan perkebunan gambir.
- e. Petani gambir atau kelembagaan petani gambir dapat memanfaatkan SRG dalam proses penjualan produk gambir dengan memenuhi persyaratanyangditentukan.

Berkaitan dengan implementasi Sistem Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya yang terbit pada tahun 2007, dan dimulai kegiatannya di lapangan pada tahun 2008, BAPPEBTI secara berkesinambungan melakukan upaya ke depan melalui serangkaian pertemuan dan kerjasama dengan para stakeholder, memberi bimbingan teknis pada pelaku usaha, serta pembuatan pedoman operasional baku bagi pengelola gudang serta SOP pengawasan. Pada tahun 2013 BAPPEBTI selaku Badan Pengawas Sistem Resi Gudang telah menyusun Master Plan pengembangan Sistem Resi Gudang tahun 2013-2019. Master Plan tersebut adalah sebagai pedoman untuk 5 tahun ke depan bagi seluruh stakeholder di dalam melaksanakan kegiatan masing-masing dan sepatutnya menjadi komitmen bersama untuk mencapainya, sehingga tercipta sinergi dalam melaksanakan program kerja tersebut.

Untuk melihat kondisi gudang Sistem Resi Gudang Gambir di Nagari Sarilamak, Peneliti melihat pada 5 aspek yaitu: 1) alur skema system resi Gudang, 2) lembaga

Sistem Resi Gudang yang mendapat persetujuan Pengelolaan, 3) Penyiapan komoditi sesuai standar (SNI), 4) penyiapan gudang (sesuai standar SNI Gudang) dan 5) implementasi bagi pelaku/lembaga dalam Sistem Resi Gudang. Kelima aspek ini merupakan aspek-aspek yang tercantum dalam panduan pelaksanaan sistem resi gudang yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



Gambar Implementasi Sistem Resi Gudang Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Sistem Resi Gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menguraikan faktor-faktor ini, penulis menggunakan 4 faktor yang ditawarkan oleh Edwards (1980) dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi. Empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi Sistem Resi Gudang Komuditas Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Penyampaian informasi mengenai sistem resi gudang yang diterima oleh masyarakat dan petani kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat, dalam 5 tahun terakhir Sistem Resi Gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berjalan maksimal. Penyampaian informasi yang tidak optimal terkait skema dan alur Sistem Resi Gudang, menyebabkan petani tidak paham dengan alur.

Komunikasi antar aktor dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Petani Gambir, PT Salimbado Jaya Indonesia, BAPPEBTI dan Perbankan, belum berjalan optimal. Terdapat miskomunikasi dalam Pengelolaan Sistem Resi Gudang sebagai contoh terkait proses BI checking di pengelola dan perbankan yang tidak sinkron, kebijakan penetapan harga yang masih dipengaruhi oleh negara lain dan belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan oleh Bappebti.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pembinaan kepada petani gambir melalui tanaga penyuluh yang ada di desa, namun tidak konsisten dengan tema Sistem Resi Gudang. Pembinaan petani dan SRG pada aspek perdagangan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM Kabuapten Lima Puluh Kota. Saat ini Sistem Resi Gudang belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi lintas sektor dalam mengimplementasikan program tersebut.

b. Aspek Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Terkait aspek ini, terlihat bahwa jumlah staf yang ada di resi gudang masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Pelatihan merupakan terobosan dalam menciptakan sumber daya manusia pengelola gudang yang memiliki kompetensi sekaligus mengatasi keterbatasan kelembagaan pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang di daerah, setelah pelatihan selesai segera menerbitkan Resi Gudang. Pelatihan sudah pernah dilakukan di awal program Sistem Resi Gudang untuk Pengelola Gudang di Jakarta yang dilakukan langsung oleh Bappebti. Rapat dan musyawarah terkait Sistem Resi Gudang gambir sudah dilakukan oleh dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan untuk pelatihan pengelola Sistem Resi Gudang menggunakan anggaran

Kementerian melalui Bappepti. Sementara, di dinas belum menganggarkan untuk kegiatan pelatihan pengelola resi gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Sikap birokrasi atau pelaksana, dan disposisi

Sikap birokrasi atau pelaksana, dan disposisi merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Aspek ini merupakan keinginan dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaan SRG di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih ditemukan peran-peran birokrasi atau pelaksana, dan disposisi yang belum optimal, seperti:

- a) BAPPEBTI belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Resi Gudang
- b) Pihak perbankan belum memahami secara detail terkait dengan skema Sistem Resi Gudang, sehingga proses BI checking dianggap menyulitkan masyarakat petani yang tidak memiliki nomor rekening di Bank
- c) Peran Pengelola (PT Salimbado Jaya Indonesia) belum optimal. Petani merasa gambir yang ada di gudang Sistem Resi Gudang tidak aman kalau disimpan terlalu lama, karena butuh penjemuran dan ditempatkan ditempat yang tinggi dari lantai. Kepercayaan petani terhadap pengelola masih kurang dan ada kekhawatiran kemungkinan kualitas gambir mereka akan turun dan akan menjadi lembab sehingga harga akan lebih murah lagi.
- d) Produk gambir yang dihasilkan petani belum memenuhi standar SNI 01-3391-1994, Gambir, dimana terdapat gambir yang masih bercampur tanah dan campuran lainnya. Petani juga merasa proses Sistem Resi Gudang juga berbelit dan lama untuk mereka bisa menghasilkan uang.

d. Aspek struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan resi gudang di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada, sesuai arahan dari Bappepti namun belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kebijakan. Selain itu, saat ini pengusaha dari India sudah mulai membuat pabrik pengolahan gambir di Indonesia, tiga unit pabrik diantaranya didirikan di Sumatera Barat. Hal ini mempengaruhi harga gambir di pasaran. Kebutuhan gambir di India yang biasanya di penuhi oleh eksportir dari Sumatera Barat, saat ini sudah bisa dipenuhi sebahagian oleh pengusaha dari India secara langsung yang membuat pabriknya di Indonesia. Namun kondisi ini tidak disikapi dengan kebijakan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi SRG di Nagari Sarilamak telah terbentuk dan dijalankan sesuai ketentuan. Aspek-aspek implementasi yaitu: 1) alur skema system resi gudang, 2) lembaga Sistem Resi Gudang yang mendapat persetujuan pengelolaan, 3) Penyiapan komoditi sesuai standar (SNI), 4) penyiapan gudang (sesuai standar SNI Gudang) dan 5) berbagai lembaga terlibat dalam Sistem Resi Gudang. Kelima aspek ini merupakan

aspek-aspek yang tercantum dalam panduan pelaksanaan sistem resi gudang yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem resi gudang gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) aspek komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam implementasi sistem resi gudang gambir sudah dilakukan tetapi belum maksimal 2) aspek sikap birokrasi birokrasi dan disposisi belum optimal, ini terlihat dari sinergisitas antar stakeholder dalam mengimplementasikan sistem resi gudang yang belum berjalan sebagaimana mestinya. 3) kekurangan sumber daya dan pelatihan yang 4) kebijakan terkait Sistem Resi Gudang gambir kurang jelas, 5) belum maksimalnya komitmen perbankan, dan lembaga yang terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar. Usman. 2011. Pengantar Statistika, Jakarta : Bumi Aksara
- Buharman, Bharnel, dan M. Ali 2001. Kelayakan finansial usahatani gambir perkebunan rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Stigma IX (1) : 62 – 68.
- Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Isaac, Stephen dan William B. Michael. 1982. *Handbook in research and evaluation: for education and behavioral sciences*, edisi ke-2, cet. ke-2. San Diego: Edits Publishers.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M/DAG/PER/05/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dari Sistem Resi Gudang
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan
- Rakhmat, Jalaluddin. 1989. *Metode penelitian komunikasi: dilengkapi contoh analisis statistik*. Bandung: Remadja karya.
- Thalib, M. A. (2022). Exposing Household Cost Accountability Practices: A Study Of Islamic Ethnomethodology. *The ES Accounting And Finance*, 1(01), 34–41. Retrieved from <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/esaf/article/view/26>
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- W. Nasrul, M. Reza, and Imran, 2023. *Gambir Market Institutional Development Model Through Strengthening Aspects of Social Capital," Menara Ilmu*, vol. 17, no. 2, pp. 85–93, doi: 10.31869/mi.v17i2.4584.